



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2026 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Pengenaan Pajak Bumi dan Pangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena pajak.

9. Tahun...

9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II BESARAN PENGENAAN PBB-P2

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOPTKP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu Objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 3

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Besaran perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian; dan
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

MACHIAVELLI HT

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	NJKP PERORANGAN	NJKP BADAN USAHA
1	2	3	4	5
1	Baradatu	Banjarmasin	61%	0
2	Baradatu	Banjar Agung	61%	0
3	Baradatu	Banjar Mulya	45%	89,5%
4	Baradatu	Banjar Baru	52%	100%
5	Baradatu	Banjar Negara	48%	100%
6	Baradatu	Banjar Setia	37%	0
7	Baradatu	Mekar Asri	64%	100%
8	Baradatu	Tiuh Balak	63%	72,7%
9	Baradatu	Campur Asri	77%	100%
10	Baradatu	Gedung Rejo	44,5%	0
11	Baradatu	Taman Asri	65%	100%
12	Baradatu	Tiuh Balak Pasar	68%	100%
13	Baradatu	Setia Negara	58%	100%
14	Baradatu	Suko Sari	47%	98,5%
15	Baradatu	Bhakti Negara	52%	100%
16	Baradatu	Tiuh Balak I	77%	83%
17	Baradatu	Gedung Pakuon	43%	100%
18	Baradatu	Cugah	91%	75%
19	Baradatu	Bumi Merapi	65%	91%
20	Baradatu	Bumi Rejo	27,5%	100%
21	Baradatu	Banjar Sari	40,5%	0
22	Baradatu	Gunung Katun	43%	100%
23	Banjit	Juku Batu	41%	0
24	Banjit	Rantau Jaya	46%	0
25	Banjit	Bandar Agung	41%	0
26	Banjit	Sumber Sari	48%	82,5%
27	Banjit	Bonglai	50%	0
28	Banjit	Campang Delapan	41%	83%
29	Banjit	Kemu	47%	92%
30	Banjit	Sumber Baru	42%	100%
31	Banjit	Neki	49%	0
32	Banjit	Rantau Temiang	47%	0
33	Banjit	Menanga Siamang	41%	100%
34	Banjit	Menanga Jaya	45%	0

35	Banjit	Rebang Tinggi	50%	0
36	Banjit	Argomulyo	51%	0
37	Banjit	Simpang Asam	48%	0
38	Banjit	Pasar Banjit	73%	100%
39	Banjit	Bali Sadar Selatan	38%	100%
40	Banjit	Bali Sadar Tengah	47%	0
41	Banjit	Bali Sadar Utara	40%	100%
42	Banjit	Donomulyo	66%	0
43	Kasui	Sukajadi	51%	93%
44	Kasui	Karang Lantang	44%	0
45	Kasui	Kedaton	43%	0
46	Kasui	Datar Bancong	44%	0
47	Kasui	Kasui Pasar	77%	100%
48	Kasui	Kasui Lama	54%	0
49	Kasui	Tanjung Kurung	40%	100%
50	Kasui	Jaya Tinggi	92%	100%
51	Kasui	Kampung Baru	45%	0
52	Kasui	Tangkas	43,5%	0
53	Kasui	Jukuh Kemuning	40,5%	0
54	Kasui	Kota Way	43%	0
55	Kasui	Tanjung Bulan	41%	100%
56	Kasui	Gelombang Panjang	50%	0
57	Kasui	Tanjung Harapan	40%	0
58	Kasui	Sinar Gading	37,50%	0
59	Kasui	Talang Mangga	41,50%	100%
60	Kasui	Tanjung Kurung Lama	40%	100%
61	Kasui	Bukit Batu	52%	100%
62	Blambangan Umpu	Sri Rejeki	33%	61%
63	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	55,5%	93%
64	Blambangan Umpu	Lembasung	57%	100%
65	Blambangan Umpu	Umpu Bakti	48%	76,5%
66	Blambangan Umpu	Umpu Kencana	48%	73,5%
67	Blambangan Umpu	Gunung Sangkaran	46%	79%
68	Blambangan Umpu	Sangkaran Bakti	35%	63,5%
69	Blambangan Umpu	Bumi Baru	32,5%	100%
70	Blambangan Umpu	Tanjung Sari	55,5%	61%
71	Blambangan Umpu	Tanjung Raja Giham	50%	51%
72	Blambangan Umpu	Tanjung Raja Sakti	40%	100%
73	Blambangan Umpu	Segara Mider	34,5%	0
74	Blambangan Umpu	Karang Umpu	30%	58,5%
75	Umpu Semenguk	Rambang Jaya	45,5%	0
76	Umpu Semenguk	Gistang	39,5%	100%
77	Umpu Semenguk	Negeri Batin	63,5%	100%
78	Umpu Semenguk	Negeri Baru	63,5%	100%

79	Umpu Semenguk	Bumi Ratu	85%	96%
80	Umpu Semenguk	Sriwijaya	45%	0
81	Umpu Semenguk	Sidoarjo	52,5%	100%
82	Umpu Semenguk	Bratayudha	36,5%	73%
83	Umpu Semenguk	Gedung Batin	44,5%	0
84	Umpu Semenguk	Negeri Bumi Putra	45,5%	0
85	Umpu Semenguk	Panca Negeri	38,5%	0
86	Umpu Semenguk	Gedung Riang	50%	0
87	Umpu Semenguk	Ojolali	45%	0
88	Bahuga	Giri Harjo	37,5%	0
89	Bahuga	Tulang Bawang	38%	0
90	Bahuga	Mesir Udik	36,8%	0
91	Bahuga	Mesir Ilir	42%	100%
92	Bahuga	Bumi Agung Wates	51%	0
93	Bahuga	Serdang Kuring	43%	0
94	Bahuga	Sapto Renggo	39%	100%
95	Bahuga	Bumi Agung	54%	0
96	Bahuga	Kuta Dewa	36%	0
97	Bahuga	Dewa Agung	35%	0
98	Bahuga	Mekar Jaya	42%	0
99	Bumi Agung	Bumi Agung	33%	100%
100	Bumi Agung	Sukamaju	34,3%	100%
101	Bumi Agung	Mulyo Harjo	39,5%	100%
102	Bumi Agung	Wono Harjo	27,5%	0
103	Bumi Agung	Tanjung Dalam	30,3%	0
104	Bumi Agung	Pisang Indah	43,3%	96%
105	Bumi Agung	Pisang Baru	30,5%	100%
106	Bumi Agung	Sri Numpi	32,3%	100%
107	Bumi Agung	Karangan	23,3%	100%
108	Bumi Agung	Bumi Say Agung	27,5%	100%
109	Buay Bahuga	Sri Tunggal	42%	0
110	Buay Bahuga	Bumi Harjo	38%	100%
111	Buay Bahuga	Sukabumi	43%	100%
112	Buay Bahuga	Suka Agung	47%	100%
113	Buay Bahuga	Sukadana	41,5%	0
114	Buay Bahuga	Punjul Agung	48%	0
115	Buay Bahuga	Nuar Maju	40%	0
116	Buay Bahuga	Way Agung	34,5%	82%
117	Buay Bahuga	Lebung Lawe	26%	0
118	Negara Batin	Negara Batin	55,8%	100%
119	Negara Batin	Purwa Agung	37%	100%
120	Negara Batin	Purwa Negara	40%	100%
121	Negara Batin	Setia Negara	34,3%	84%
122	Negara Batin	Sri Mulyo	44%	100%
123	Negara Batin	Sri Menanti	38%	100%
124	Negara Batin	Kerta Jaya	40%	60%

125	Negara Batin	Marga Jaya	42%	74%
126	Negara Batin	Bumi Jaya	38%	92,5%
127	Negara Batin	Gedung Jaya	45%	100%
128	Negara Batin	Adi Jaya	37%	100%
129	Negara Batin	Sari Jaya	33,2%	87%
130	Negara Batin	Gisting Jaya	38%	100%
131	Negara Batin	Negara Mulya	33,3%	100%
132	Negara Batin	Kota Jawa	53%	100%
133	Pakuan Ratu	Tanjung Serupa	37%	100%
134	Pakuan Ratu	Bumi Mulya	39%	0
135	Pakuan Ratu	Baktinegara	35%	100%
136	Pakuan Ratu	Sukabumi	40,5%	100%
137	Pakuan Ratu	Tanjung Agung	38,5%	78%
138	Pakuan Ratu	Serupa Indah	48%	78,5%
139	Pakuan Ratu	Pakuan Baru	51%	99%
140	Pakuan Ratu	Tanjung Ratu	43,5%	100%
141	Pakuan Ratu	Way Tawar	47%	100%
142	Pakuan Ratu	Pakuan Sakti	36%	50%
143	Pakuan Ratu	Negara Harja	36%	100%
144	Pakuan Ratu	Negara Tama	49,5%	100%
145	Pakuan Ratu	Negara Sakti	34%	100%
146	Pakuan Ratu	Negara Ratu	48%	100%
147	Pakuan Ratu	Rumbih	41%	100%
148	Pakuan Ratu	Gunung Waras	37%	100%
149	Pakuan Ratu	Gunung Cahya	54%	0
150	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	42,3%	100%
151	Pakuan Ratu	Karang Agung	35,5%	100%
152	Negeri Agung	Negeri Agung	50,5%	100%
153	Negeri Agung	Bandar Dalam	34,5%	100%
154	Negeri Agung	Pulau Batu	53,5%	0
155	Negeri Agung	Penengahan	36,5%	100%
156	Negeri Agung	Karya Agung	34,5%	100%
157	Negeri Agung	Sunsang	33%	0
158	Negeri Agung	Kota Baru	38%	100%
159	Negeri Agung	Kotabumi Way Kanan	35,5%	0
160	Negeri Agung	Gedung Menang	39%	79,5%
161	Negeri Agung	Gedung Harapan	38,5%	100%
162	Negeri Agung	Tanjung Rejo	41,5%	100%
163	Negeri Agung	Mulyasari	40,5%	0
164	Negeri Agung	Kalipapan	48%	100%
165	Negeri Agung	Way Limau	37,5%	0
166	Negeri Agung	Gedung Jaya,	47%	0
167	Negeri Agung	Rejosari	31%	100%
168	Negeri Agung	Bandar Kasih	34%	0
169	Negeri Agung	Sumber Rejeki	42%	0

170	Negeri Agung	Mulya Agung	44%	0
171	Way Tuba	Way Tuba1	44,5%	100%
172	Way Tuba	Karya Jaya	46,5%	100%
173	Way Tuba	Say Umpu	41,5%	0
174	Way Tuba	Beringin Jaya	47%	100%
175	Way Tuba	Suma Mukti	45,5%	0
176	Way Tuba	Ramsay	47%	0
177	Way Tuba	Bandar Sari	45%	84%
178	Way Tuba	Bumi Dana	48,5%	80,5%
179	Way Tuba	Bukit Gemuruh	38,7%	68%
180	Way Tuba	Way Mencar	49%	0
181	Way Tuba	Way Pisang	52%	0
182	Way Tuba	Bukit Harapan	45%	53,5%
183	Way Tuba	Way Tuba Asri	63%	0
184	Rebang Tangkas	Madang Jaya	56,5%	95%
185	Rebang Tangkas	Air Ringkih	36%	100%
186	Rebang Tangkas	Simpang Tiga	84%	90%
187	Rebang Tangkas	Beringin Jaya	38%	0
188	Rebang Tangkas	Tanjung Tiga	55%	0
189	Rebang Tangkas	Tanjung Raya	45%	0
190	Rebang Tangkas	Gunung Sari,	51%	85%
191	Rebang Tangkas	Lebak Peniangan	63,5%	100%
192	Rebang Tangkas	Karya Maju	34,5%	0
193	Rebang Tangkas	Mulya Jaya	37%	100%
194	Negeri Besar	Negeri Besar	51%	100%
195	Negeri Besar	Kali Awi	52%	0
196	Negeri Besar	Kiling-kiling	54%	100%
197	Negeri Besar	Negara Jaya	44%	100%
198	Negeri Besar	Sri Basuki	44,5%	91%
199	Negeri Besar	Pagar Iman	43,5%	100%
200	Negeri Besar	Tegal Mukti	45%	95%
201	Negeri Besar	Bima Sakti	35%	100%
202	Negeri Besar	Tiuh Baru	33,8%	100%
203	Negeri Besar	Kaliawi Indah	61%	100%
204	Negeri Besar	Negeri Jaya	40%	100%
205	Negeri Besar	Negeri Kasih	47%	100%
206	Negeri Besar	Tanjung Mas	44%	100%
207	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	66%	100%
208	Gunung Labuhan	Bengkulu Jaya	72%	0
209	Gunung Labuhan	Banjar Sakti	64%	0
210	Gunung Labuhan	Way Tuba2	45%	100%
211	Gunung Labuhan	Kayu Batu	44%	100%
212	Gunung Labuhan	Negeri Sungkai	42%	0
213	Gunung Labuhan	Sukarama	42%	0
214	Gunung Labuhan	Bengkulu Rejo	50%	0
215	Gunung Labuhan	Suka Negeri	46%	100%

216	Gunung Labuhan	Negeri Mulyo	43%	0
217	Gunung Labuhan	Tiuh Balak II	39%	100%
218	Gunung Labuhan	Curup Patah	49%	0
219	Gunung Labuhan	Gunung Baru	86,5%	100%
220	Gunung Labuhan	Bengkulu	55%	100%
221	Gunung Labuhan	Bengkulu Raman	42%	94%
222	Gunung Labuhan	Gunung sari	50%	0
223	Gunung Labuhan	Banjar Ratu	43%	0
224	Gunung Labuhan	Negeri Ujan Mas	45%	0
225	Gunung Labuhan	Bengkulu Tengah	58%	0
226	Gunung Labuhan	Gunung Pekuwon	47%	0
227	Gunung Labuhan	Labuhan Jaya	48,5%	34,30%

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012